

| | |
|-------------------------|-------|
| Asal : Hadiah Pembelian | KLASS |
| Terima : Tel 1 MAY 1995 | 3362 |
| No. Ind PTK-95 75 f. | MCM |
| | lib |

**ANALISIS KOMPARATIF REALISASI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DAERAH MISKIN DAN DAERAH TIDAK MISKIN
(Studi di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi
Tahun 1989 - 1993)**

SKRIPSI



Dijukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh :

Achmad Mun'im

8808101303

Tidak Dipinjamkan Keluar

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
1995**

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF REALISASI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DAERAH MISKIN DAN DAERAH
TIDAK MISKIN

(Studi di Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1989-1993)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Mun'im
N. I. M. : 8808101303
Jurusan : Studi Pembangunan

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

23 Maret 1995

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam ilmu ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

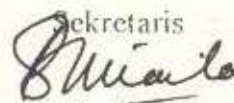
Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Dra. Soemiati R.
NIP. 130 325 927



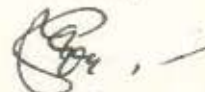
Sekretaris


Drs. J. Sugiharto, SU.
NIP. 130 610 494

Anggota


Drs. Bambang Yudhono
NIP 130 355 409

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. Sakueni, Msc.
NIP 130 350 764

Tanda Persetujuan Skripsi Sarjana Ekonomi

Nama : Achmad Mun'im
N.I.M : 8808101303
Tingkat : Sarjana
Jurusan : Study Pembangunan
Mata Kuliah Yang
Menjadi Dasar Pe-
nyusunan Skripsi : Ekonomi Publik
Dosen Pembimbing : 1. Drs. Bambang Yudhono
2. Drs. H. Achmad Qosyim

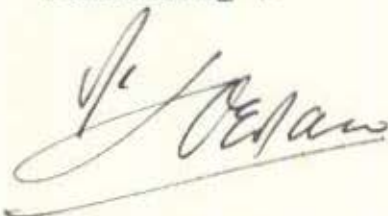
Disyahkan di Jember

Pada tanggal : 16 Pebruari 1995

Disetujui dan diterima oleh :

Dosen Pembimbing

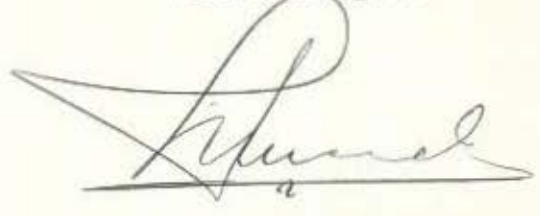
Pembimbing I



Drs. Bambang Yudhono

NIP 130 355 409

Pembimbing II



Drs. H. Achmad Qosyim

NIP 130 937 192

Semua yang tertulis dalam karya yang sederhana ini hanyalah demi :

- Perempuan pendiam yang tidak pernah diam dan tidak pernah sunyi.
- Almarhum yang tenang disisi Pemiliknya
- Sang dara, bakal ibu dari anak-anakku kelak, semoga.
- Almamater.
- Orang-orang tersayang.
- Teman-teman serta adik-adik di Blambangan dan eks-Blambangan.

M O T T O :

"Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan kepada-Ku"

(Adzariat, 58)

"Wahai kekasih hati, tiada lain bagiku kecuali Engkau. Maka kasihanilah sekarang pelaku dosa yang mendatangi Mu.

Wahai harapan, ketenangan dan kegembiraanku.

Hati telah menolak untuk mencintai selain-MU"

(Rabi'ah Al-Adawiyah)

"Kenapa kita mesti tertawa, sementara sangat banyak yang kita harus menangis karenanya"

(Achmad Mun'im)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada saatnya.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini penulis banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi beserta seluruh staf yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Bambang Yudhono, selaku dosen pembimbing I yang telaten membimbing penulis disela-sela kesibukannya yang bertumpuk.
3. Bapak Drs. H. Achmad Qosyim, selaku dosen pembimbing II atas segala bimbingan dan petunjuknya yang sangat membantu penulis.
4. Bapak kepala Dispenda Tingkat II Banyuwangi beserta seluruh staf yang telah membantu penulis selama penulis melakukan penelitian.
5. Keluargaku atas segala perhatian dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas.
6. Teman-teman serta semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun spirituil, khususnya untuk Rezeki-kuku yang kehadirannya begitu berarti.

Atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun sehingga karya yang sederhana ini dapat menjadi lebih baik dan berguna.

Jember, Pebruari 1995

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.4 Hipotesis | 7 |
| 1.5 Metode Penelitian | 7 |
| 1.5.1 Menentukan Daerah Penelitian | 7 |
| 1.5.2 Sumber dan Jenis Data | 8 |
| 1.5.3 Metode Analisis Data | 8 |
| 1.6 Terminologi | 10 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II | |
| BANYUWANGI | 12 |
| 2.1 Keadaan Geografis | 12 |
| 2.2 Keadaan Penduduk | 13 |
| 2.3 Sarana Pendidikan | 14 |
| 2.4 Sumber Daya Ekonomi | 15 |
| 2.4.1 Sektor Pertanian | 15 |
| 2.4.2 Sektor Industri | 17 |
| 2.5 Pengertian Umum Pajak Bumi dan Bangunan | 19 |
| 2.6 Sistem Pengenaan PBB | 21 |
| 2.7 Kemiskinan di Banyuwangi | 23 |

| | | |
|---------|--|----|
| BAB III | LANDASAN THEORI | 24 |
| | 3.1 Keuangan Daerah dan Pembangunan | 24 |
| | 3.2 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah | 25 |
| | 3.3 Sumber-Sumber Keuangan Negara dan Keua- ngan Daerah | 27 |
| | 3.4 Pajak | 29 |
| | 3.5 Kemiskinan | 33 |
| BAB IV | PEMBAHASAN REALISASI PENERIMAAN PBB DI DAE- RAH MISKIN DAN DAERAN TIDAK MISKIN DI DAE- RAH BANYUWANGI | 38 |
| | 4.1 Desa-desa Miskin di Kabupaten Banyuwa- ngi | 38 |
| | 4.2 Perbandingan Prosentase Realisasi Pene- rimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dae- rah Miskin dan Daerah Tidak Miskin | 39 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 41 |
| | ,lh8 | |
| | 5.1 Kesimpulan | 41 |
| | 5.2 Saran-saran | 41 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 43 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1 PERBANDINGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK DENGAN SEKTOR LAINNYA BERDASARKAN APBN 1992/1993 | 3 |
| 2.1 PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI ANTARA TAHUN 1990-1993 | 14 |
| 2.2 JUMLAH SEKOLAH, GURU, MURID, DARI TK-SMTA DI BANYUWANGI TAHUN AJARAN 1990/1991 - 192/1993 | 15 |
| 2.3 PERKEMBANGAN LUAS PANEN DAN RATA-RATA PRODUKSI PADI DI BANYUWANGI TAHUN 1986-1990 | 16 |
| 2.4 LUAS AREAL TANAMAN PERKEBUNAN RAKYA PADA MUSIM PANEN 1990 | 16 |
| 2.5 LUAS DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN NEGARA, SWASTA DAN RAKYAT MENURUT JENIS TANAMAN TAHUN 1992 DI KABUPATEN BANYUWANGI | 17 |
| 2.6 JUMLAH INDUSTRI BESAR DAN SEDANG SERTA PENYERAPAN TENAGA KERJA DI BANYUWANGI TAHUN 1987 .. | 19 |
| 4.1 PROSENTASE REALISASI PENERIMAAN PBB DI DAERAH MISKIN DAN DAERAH TIDAK MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI ANTARA TAHUN 1989 - 1993 | 38 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 PROSENTASE REALISASI PENERIMAAN PBB DI DAERAH MISKIN DAN DAERAH TIDAK MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI ANTARA TAHUN 1989 - 1993
- 2 ANALISIS UJI BEDA UNTUK MENGETAHUI APAKAH TERDAPAT PERBEDAAN PROSENTASE REALISASI PENERIMAAN PBB ANTARA DAERAH MISKIN DAN DAERAH TIDAK MISKIN.
- 3 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1989
- 4 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1989
- 5 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SINGOJURU KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1989
- 6 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1990
- 7 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1990
- 8 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SINGOJURU KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1990
- 9 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1991
- 10 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1991
- 11 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SINGOJURU KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1991
- 12 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1992
- 13 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1992

- 14 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SINGOJURU
KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1992
- 15 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1993
- 16 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN SINGOJURU
KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1993
- 17 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI PER 31 MARET 1993
- 18 DATA-DATA DESA MISKIN PER-KABUPATEN/KOTAMADYA DI
PROPINSI TINGKAT I JAWA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang menyadari betapa pentingnya pembangunan, oleh karena itu langkah-langkah dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan lancarnya pembangunan merupakan tuntutan masyarakat. Dalam Tap MPR No II/MPR/1993 disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan, khususnya yang menyangkut masalah keuangan negara:

Pembangunan sektor keuangan ditingkatkan, diperluas, dan diarahkan untuk memperbesar kemampuan sumber dana dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan nasional.

Disebutkan pula dalam Tap MPR No II/MPR/1993 tersebut bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting, ditingkatkan peranannya, terutama pajak langsung secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan adil agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya serta mampu menunjang kegiatan ekonomi menurut Prof.DR. P.J.A Adrianis sebagai mana dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo S.H. (1991), mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Kewajiban membayar pajak mengandung 2 aspek.

Pertama, untuk wajib pajak ada keharusan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sebab bila tidak, kepada wajib pajak dapat dikenai sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur oleh Undang-undang perpajakan.

Kedua, kepada wajib pajak secara moral dituntut untuk menempatkan kewajiban perpajakannya diatas kepentingan pribadi atau golongan, minimal menempatkannya dalam keseimbangan antara hak dan kewajibannya.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting sebagai alternatif terhadap merosotnya penerimaan dari migas sejak pertengahan tahun anggaran 1984/1985 atau sejak awal pelita IV. Penerimaan negara yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak-pajak lainnya. Untuk melihat betapa penting betapa penting penerimaan sektor pajak bagi negara, berikut ini disajikan perbandingan penerimaan antara sektor pajak dengan penerimaan negara dari sektor lainnya berdasarkan APBN 1992/1993.

Tabel 1 PERBANDINGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK DENGAN SEKTOR LAINNYA BERDASARKAN APBN 1992/1993.

| Sumber Penerimaan | Jumlah (milyar Rp) | % terhadap APBN | % terhadap Penerimaan DN |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak | 23.307,3 | 41,5 | 50,1 |
| Penerimaan Higas | 13.947,5 | 24,9 | 30,1 |
| Bea Masuk dan Berbagai Cukai | 5.483,0 | 9,8 | 11,8 |
| Penerimaan Bukan Pajak | 2.909,6 | 5,2 | 6,3 |
| Pinjaman Luar Negeri | 9.600,2 | 17,1 | -- |

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 1993

Salah satu penerimaan yang penting dari sektor pajak adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan pemerintah pusat, tetapi alokasi penerimaannya sebagian besar akan diterima oleh Pemda Tingkat I dan II.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi dalam 2 sektor, yaitu sektor kota dan desa. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang penting, terutama di sektor kota. Menurut perkiraan, bila 95% semua tanah

terdaftar dengan cermat, bila nilai jual semua tanah 90% dari harga pasar sebenarnya, bila 85% dari pajak terhutang berhasil dipungut dan tunjangan pajak/pajak terhutang dapat dinaikan menjadi 70 %, maka penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai 2,4 triliun rupiah pada tahun 1996, yang berarti lebih dari 10 kali lipat dibanding penerimaan tahun 1986. (Masri Maris, 1989;40)

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan nasional yang termaktup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional terdiri dari pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah, antar dan antara kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah¹ perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara. (Tap MPR No II/MPR/1993)

Dalam pembangunan jangka panjang tahap I (1969-1994) tingkat kemiskinan telah berhasil kita tekan, dan saat ini jumlah penduduk miskin kuran lebih 27 juta jiwa. (Epoce No 12 Tahun IV/1994)

Jumlah ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih tergolong cukup besar. Tingka kemiskinan yang besar ini sebagai akibat dari kurang meratanya pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan. Jika kita kaitkan antara tingkat kemiskinan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung punya hubungan yang menarik untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian mengenai masalah ini perlu untuk dilakukan karena peraturan-peraturan perpajakan selalu tidak mengabaikan latar belakang ekonomi dan keadaan dalam masyarakat. Jadi pajak berlaku untuk semua masyarakat, baik masyarakat di daerah miskin maupun di daerah tidak miskin.

Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan yang penting di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Dengan mendasarkan pada Undang-undang perpajakan (dalam hal ini Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan) yang selevel memperhatikan latar belakang ekonomi masyarakat, maka menarik untuk diketahui bagaimana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara daerah mis-

kin dan daerah tidak miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, dimana terdapat 9 daerah miskin yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Srono, Singojuruh, dan Glagah.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dikemukakan suatu permasalahan : Apakah terdapat perbedaan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara daerah miskin dan daerah tidak miskin Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi antara tahun 1989-1993 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah miskin dan daerah tidak miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi antara tahun 1989-1993.
2. Membandingkan prosentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah miskin dan daerah tidak miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi antara tahun 1989-1993.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya, terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah,
2. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi siapa saja yang tertarik dan berkepentingan dengan bidang ini.

1.4 Hipotesis

Dari uraian di atas dapat dirumuskan suatu hipotesis:

1. Realisasi penerimaan PBB secara nominal meningkat baik untuk daerah miskin maupun daerah tidak miskin.
2. 1. Penerimaan PBB untuk daerah miskin tidak memenuhi target.
2. Penerimaan PB untuk daerah tidak miskin dapat memenuhi target.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Menentukan Daerah Penelitian

Sebagai lumbung padi Jawa Timur, sudah barang tentu tanah-tanah pertanian di Banyuwangi merupakan tanah-tanah produktif dan kondisinya subur, dengan demikian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan besar. Adanya kantong

kemiskinan di Banyuwangi (meskipun kecil) merupakan hal yang menarik mengingat kondisi tanahnya yang produktif dan subur yang akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, jadi data skunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. (M. Natsir , 1985)

Dalam penelitian ini data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi, Kantor Statistik Banyuwangi, Literatur, dan media umum lainnya yang dapat dijadikan landasan teoritis penelitian ini.

1.5.3 Methode Analisis Data

Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah miskin dan daerah tidak miskin di gunakan analisis proporsi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penerimaan PBB Daerah Miskin}}{\text{Target Penerimaan PBB Daerah Miskin}} \times 100\% = \dots\%$$

$$\frac{\text{Penerimaan PBB Daerah Tidak Miskin}}{\text{Target Penerimaan PBB Daerah Tidak Miskin}} \times 100\% = \dots\%$$

(Dunairy,1990)

Untuk itu diambil 36 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi sebagai sample penelitian, dimana 9 desa merupakan desa miskin dan 27 desa lainnya merupakan desa tidak miskin.

8Untuk mengetahui perbedaan prosentase realisasi penerimaan PBB di daerah miskin dan daerah tidak miskin di gunakan analisis uji beda :

$$t = \frac{\bar{D}}{Sd/\sqrt{n}}$$

dimana,

$$\bar{D} = X - Y/n$$

Sd= Standart deviasi

n = Jumlah pasangan

(Jarwanto,1988)

Tingkat keyakinan 95%.

Kriteria pengujian :

- Bila $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka h_0 ditolak, berarti ada perbedaan.
- Bila $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} maka h_0 diterima, berarti tidak ada perbedaan.

Dalam penelitian ini, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tiap-tiap daerah dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan prosentase

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara daerah miskin dan daerah tidak miskin, karena target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ditetapkan berdasarkan besar kecilnya obyek pajak tanpa melihat apakah obyek pajak tersebut ada di daerah miskin atau di daerah tidak miskin. Dengan demikian dapat dilihat apakah prosentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah miskin itu berbeda dengan daerah tidak miskin, lebih kecil, atau mungkin lebih besar.

1.6 Terminologi

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat yang dapat diusahakan. (Rochmat Soemitro, S.H. 1982)
2. Daerah miskin adalah daerah dimana tingkat pengeluaran perkapitanya sebesar Rp. 20.614,- untuk daerah perkotaan dan Rp. 13.295,- untuk pedesaan atau lebih kecil dari angka-angka tersebut (SUSENAS 1990)

3. Analisis komparatif adalah mempelajari dengan membandingkan beberapa masalah untuk mengetahui kemungkinan terdapatnya perbedaan. (Kamus Umum Bahasa Indonesia).

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

2.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi secara geografis terletak antara $7^{\circ},43LS$ dan $6^{\circ},46LS$ serta antara $113^{\circ},53BT$ dan $114^{\circ},38BT$. Luas wilayah secara keseluruhan adalah $5.762,5 \text{ Km}^2$. Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- sebelah barat berbatasan dengan Jember dan Bondowoso,
- sebelah utara berbatasan dengan Situbondo dan Bondowoso,
- sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia,
- sebelah timur dengan selat Bali. (Kantor Statistik Banyuwangi 1993)

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi berada pada ketinggian antara 0-100 meter diatas permukaan laut. Bila diklasifikasikan menurut wilayah tanah usaha (WTU) maka terdapat beberapa klasifikasi : (Kantor Statistik Banyuwangi 1993)

- a. Daerah diketinggian 0-25 meter dengan luas wilayah 41.962 hektar (12,04%) dari luas tanah di Banyuwangi. Daerah-daerah yang berada di ketinggian ini : kecamatan Banyuwangi, Bangorejo, Giri, Kabat, Huncar, Sanggar, Purwoharjo, Rogojampi, Srono, Tegal dlimo dan Wongsorejo.

- b. Ketinggian 25-100 meter dengan luas 92.001 hektar (26,45%) dari luas tanah. Daerah ini hampir disetiap kecamatan ditemui, hanya di kecamatan Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Sanggar, luasnya sempit.
- c. Ketinggian 100-500 meter, luasnya 156.939 hektar (45,65%) dari keseluruhan luas tanah di Banyuwangi. Terdapat disemua kecamatan, kecuali kecamatan Banyuwangi, dan Muncar.
- d. Ketinggian 500-1000 meter dengan luas 36.527 hektar (10,88%) terdapat di kecamatan Genteng, Giri, Glagah, Glenmore, Kabat, Singgon, Purwoharjo.
- e. Ketinggian diatas 1000 meter. Terdapat di kecamatan Glenmore, Giri, Banyuwangi, Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Sanggar.

2.2 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi tersebar di 19 Kecamatan yang terdiri dari 175 desa. Penduduknya sebagian besar terdiri dari suku bangsa Jawa, Madura dan beberapa suku bangsa yang lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur tergolong tidak tinggi, namun tiap tahun selalu mengalami kenaikan, sehingga perlu ada penekanan laju pertumbuhannya. Untuk mengetahui laju pertumbuhan jumlah

penduduk Kabupaten Banyuwangi antara tahun 1990 sampai 1993 dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI ANTARA TAHUN 1990 - 1993

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|-------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1990 | 1.454.870 |
| 1991 | 1.458.362 |
| 1992 | 1.461.862 |
| 1993 | 1.465.370 |

Sumber : Kantor Statistik Banyuwangi 1994

2.3 Sarana Pendidikan

Pendidikan formal maupun informal, sangat erat hubungannya dengan aspek ketenagakerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja kurang produktif dan sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Lembaga pendidikan formal di Banyuwangi cukup tersedia mulai dari taman kanak-kanak hingga SHTA. Perkembangan pendidikan formal baik dari jumlah pendidikan, jumlah guru, dan jumlah murid pada berbagai tingkat pendidikan mulai dari TK sampai SHTA untuk tahun ajaran 1990/1991 - 1992/1993 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 JUMLAH SEKOLAH, GURU, MURID, DARI TK-SMTA DI BANYUWANGI TAHUN AJARAN 1990/1991 - 192/1993

| | Sekolah | | | Guru | | | Murid | | |
|------|---------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| | 91 | 92 | 93 | 91 | 92 | 93 | 91 | 92 | 93 |
| TK | 437 | 437 | 437 | 1.171 | 1.188 | 1.171 | 18.387 | 19.890 | 28.387 |
| SD | 987 | 985 | 974 | 7.751 | 6.702 | 7.848 | 172.398 | 172.470 | 166.745 |
| SMP | 142 | 139 | 142 | 2.957 | 2.484 | 2.443 | 43.964 | 38.092 | 38.889 |
| SMTA | 127 | 80 | 78 | 2.427 | 2.227 | 1.608 | 41.785 | 24.011 | 20.215 |

Sumber : Kantor Statistik Banyuwangi 1993

2.4 Sumber Daya Ekonomi

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi terdapat sumber daya ekonomi yang penting yang memberikan kehidupan bagi sebagian besar penduduk banyuwangi antara lain :

2.4.1 Sektor Pertanian

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Pada tabel di bawah ini terdapat data mengenai perkembangan luas panen dan rata-rata produksi padi di Banyuwangi tahun 1986-1990.

Tabel 2.3 PERKEMBANGAN LUAS PANEN DAN RATA-RATA PRODUKSI PADI DI BANYUWANGI TAHUN 1986-1990

| TAHUN | LUAS PANEN (hektar) | PRODUKSI (ton) | RATA-RATA PRODUKSI (kg/ha) |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1988 | 120.034 | 667.962,00 | 56,84 |
| 1986 | 117.302 | 667.049,37 | 54,60 |
| 1986 | 119.273 | 688.266,00 | 55,18 |
| 1986 | 125.597 | 706.608,72 | 56,26 |
| 1986 | 120.962 | 682.903,00 | 56,46 |

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Banyuwangi
Nopember 1992

Disub sektor perkebunan rakyat telah menghasilkan produksi yang cukup penting, dan yang produksinya paling tinggi adalah kelapa. Tabel berikut memperlihatkan hal di atas.

Tabel 2.4 LUAS AREAL TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT PADA MUSIM PANEN 1990

| JENIS TANAMAN | LUAS AREAL (hektar) | PRODUKSI (ton) |
|----------------|------------------------|-------------------|
| Kopi | 1.853 | 731,40 |
| Cengkeh | 1.373 | 142,60 |
| Kelapa | 26.799 | 28.466,50 |
| Tebu | 795 | 1.002,50 |
| Panili | 370 | 128,30 |
| Tembakau | 1.091 | 567,00 |
| Kelapa Hibrida | 253 | 5,30 |
| Kapuk | 1.570 | 2.146,70 |

Sumber : Dinas Perkebunan Banyuwangi, Nopember 1992

Secara keseluruhan luas areal dan jumlah produksi dari sektor perkebunan (rakyat, swasta, dan negara) pada tahun 1992 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 LUAS DAN PRODUKSI TANAHAN PERKEBUNAN NEGERA, SWASTA DAN RAKYAT MENURUT JENIS TANAMAN TAHUN 1992 DI KABUPATEN BANYUWANGI

| Jenis Tanaman Perkebunan | Luas (ha) | Produksi (ton) | Bentuk Produksi |
|--------------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1. Karet | 6.792 | 4.502,1 | Karet kering |
| 2. Kopi | 13.687 | 7.655,0 | Kopi Ose/Berasan |
| 3. Kakao | 9.698 | 4.750,1 | Biji kering |
| 4. Cengkeh | 3.898 | 705,4 | Bunga kering |
| 5. Kelapa | 27.875 | 28.827,8 | Egivalen Kopra |
| 6. Kapuk | 2.699 | 3.242,8 | Gelondong kering |
| 7. Abacca | 457 | 509,1 | Serat kering |
| 8. Tebu | 1.595 | 7.425,8 | Hablur gula |
| 9. Jarak | 50 | 29,5 | Biji kering |
| 10. Panili | 365 | 67,5 | Polong basah |
| 11. Pinang | 148 | 152,2 | Buah basah |
| 12. Asam Jawa | 27 | 46,1 | Polong basah |
| 13. Kanaf | 337 | 408,8 | Serat kering |
| 14. Tembakau | 438 | 170,1 | Tembakau rajang |
| 15. Kapas | 531 | 187,1 | Kapas berbiji |
| 16. Kelapa Deres | 1.040 | 7.360,8 | Gula merah |
| 17. Lada | 25 | 7,7 | Biji kering |
| 18. Kencur | 12 | 50,9 | Rimpang basah |
| 19. Hente | 12 | 2,5 | Biji kering |
| 20. Jahe | 35 | 146,5 | Rimpang basah |
| 21. Kunir | 33 | 90,0 | Rimpang basah |
| 22. Lengkuas | 27 | 99,7 | Rimpang basah |
| 23. Kapulogo | 4 | 5,8 | Biji kering |
| 24. temulawak | 1 | 1,7 | Rimpang basah |
| Jumlah 1992 | 69.384 | 68.424,8 | |
| 1991 | 67.384 | 65.692,0 | |
| 1990 | 68.111 | 60.377,9 | |

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi 1993

2.4.2 Sektor Industri

Perkembangan industri selain untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga dapat memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Industri yang berkembang pesat di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi adalah industri pengalengan ikan (sarden), hal ini wajar karena kabupaten Banyuwangi merupakan penghasil ikan yang cukup besar. Industri sarden terdapat di kecamatan Huncar, di mana pelabuhan ikan di Huncar merupakan pelabuhan ikan terbesar setelah Bagansiapiapi.

Selain industri pengalengan ikan juga terdapat industri kertas, pengantongan pupuk, pembuatan kapal kayu, tepung ikan, minyak kelapa, es batu, es carga, minuman ringan, pengawet daging, kertas merang, kaleng makanan, dan lain-lain.

Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6 JUMLAH INDUSTRI BESAR DAN SEDANG SERTA PENYERAPAN TENAGA KERJA DI BANYUWANGI TAHUN 1987

| JENIS INDUSTRI | JUMLAH INDUSTRI | | JUMLAH TENAGA KERJA | |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------|
| | BESAR | SEDANG | BESAR | SEDANG |
| Kertas | 1 | - | 715 | - |
| Pengantongan Pupuk | 1 | - | 192 | - |
| Pembuatan Kapal Kayu | - | 2 | - | 226 |
| Sarden | - | 9 | - | 1.111 |
| Tepung Ikan | - | 5 | - | 114 |
| Minyak kelapa | - | 4 | - | 168 |
| Es Batu | - | 7 | - | 93 |
| Es Carga | - | 1 | - | 100 |
| Minuman Ringan | - | 1 | - | 45 |
| Pengawet Daging | - | 1 | - | 20 |
| Kertas Merang | - | 3 | - | 70 |
| Kaleng Makanan | - | 3 | - | 110 |
| Bahan Bangunan | - | 1 | - | 40 |
| JUMLAH | 2 | 37 | 907 | 2.090 |

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, November 1982

2.5 Pengertian Umum Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai negara agraris, maka dalam beberapa Pelita sektor agraris menempati urutan pertama dalam pembangunan. Juga karena falsafah hidup bangsa adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya perlu diperhatikan untuk kepentingan pembangunan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah selalu berusaha untuk senantiasa memberikan manfaat dari hasil bumi dan kekayaan alam demi kepentingan warga negaranya. Maka dari itu wajarlah bila masyarakat menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang mereka peroleh dari sumber-sumber alam tersebut kepada negara melalui pembayaran pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hal-hal di atas tersimpul suatu falsafah dalam Undang-undang perpajakan di negara kita, termasuk juga Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan dan kegotongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan;
2. Bumi dan bangunan memberikan kedudukan sosial, ekonomi yang lebih serta keuntungan bagi pemilik dan/atau yang menguasainya;
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara;

4. sistim perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti dan efektif pelaksanaannya.

Jadi azas dari PBB tegasnya sebagai berikut :

1. Sederhana;
2. Mudah dimengerti;
3. Semangat gotong royong;
4. Adil;
5. Kepastian hukum.

Sesuai dengan azas sederhana yang telah dikemukakan (yang sesuai pula dengan maksud yang terkandung dalam GBHN) beberapa Ordonansi dan ketentuan-ketentuan Undang-undang darurat No 11 Tahun 1957, yang menyebabkan tumpang tindihnya perpajakan di negara kita telah di cabut, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1985 azasnya benar-benar sederhana, mudah dimengerti, adil, penuh semangat gotong royong dan adanya kepastian hukum mengenai sistim perpajakan baru yang kini berlaku di negara RI.

Sehubungan dengan penyederhanaan di atas, maka struktur Undang-undang PBB No 12 Tahun 1985 menjadi sederhana pula agar mudah dimengerti dan mudah dalam pemenuhan kewajibannya, tetapi dalam pengertian sederhana itu terdapat pengertian kemantapan. Struktur tersebut adalah sebagai berikut :

"Terdiri dari 14 bab dan 31 pasal, 3 pasal diatur dengan peraturan pemerintah, 8 butir dengan SK Menteri Keuangan, dan 3 ayat diatur dengan SK Direktur Jendral Pajak."

Adapun sistimatikan dari undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- I. Ketentuan Umum.
- II. Obyek Pajak.
- III. Subyek Pajak.
- IV. Tarif Pajak.
- V. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak.
- VI. Tahun Pajak, Saat dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terhutang
- VII. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak
- VIII. Tatacara Pembayaran dan Penagihan
- IX. Keberatan dan Banding.
- X. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak.
- XI. Ketentuan Lain lain.
- XII. Ketentuan Pidana.
- XIII. Ketentuan Penutup.

2.6 Sistem Pengenaan PBB

Sistem pengenaan PBB didasarkan pada pasal IX dan X Undang-undang No 12 Tahun 1985. Dalam kedua pasal terse-

hal disebutkan bahwa subyek pajak harus memberitahukan atau mendaftarkan obyek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang dapat diambil di Kantor Ditjen Pajak Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II atau tidak jarang pula SPOP dikirikan kerumah/alamat subyek pajak, untuk diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta sejujur-jujurnya agar tidak ada masalah dikemudian hari

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi SPOP dibagikan kepada para kepala desa yang nantinya akan diserahkan pada para subyek pajak yang ada di daerahnya. Setelah SPOP diisi dengan benar lalu diberikan lagi kepada kepala desa yang nantinya diserahkan kepada aparat pajak/ petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi. Dari data-data yang ada dalam SPOP tersebut akan bisa ditetapkan target penerimaan PBB pada masing-masing desa di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi

Yang menjadi masalah di Banyuwangi adalah seringnya subyek pajak menghindar jika didatangi kepala desa untuk diberi SPOP. Sehingga kadang-kadang SPOP subyek pajak diisi oleh kepala desa/aparat desa. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan karena seringkali apa yang ditulis dalam SPOP tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga banyak subyek pajak yang dirugikan.

2.7 Kemiskinan di Banyuwangi

Prosentase kemiskinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi tergolong kecil, yaitu hanya sekitar 5,143%. Dari 175 desa yang ada di kabupaten Banyuwangi hanya terdapat 9 desa yang termasuk desa miskin. Ke-9 desa tersebut tersebar di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Srono 1 desa, kecamatan Singojuru 4 Desa, dan kecamatan Glagah 4 desa.

Dari 175 desa tersebut terdiri dari 138 desa rural yaitu desa yang jauh dari kota dan 37 desa urban yaitu desa yang dekat dengan kota. Dari jumlah 138 desa rural terdapat 5 desa yang tergolong miskin (3,6%). Sedangkan dari 37 desa urban terdapat 4 desa yang termasuk miskin (10,81%). Jadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi prosentase kemiskinan di desa urban lebih besar dari desa rural. (Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Juni 1993).

BAB III

LADASAN THEORI

3.1 Keuangan Daerah dan Pembangunan

Pembangunan bagi hampir semua negara berkembang adalah merupakan tugas yang tak dapat ditangguhkan pelaksanaannya, sehingga amat penting campur tangan pemerintah dalam masalah pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi.

Dari berbagai pengertian pembangunan, mengandung makna yang sama yaitu suatu perubahan yang positif yang membawa pertumbuhan dalam arti memberikan perubahan kondisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebagaimana di kemukakan oleh G.H. Meier dan R.E. Baldwin sebagai berikut :

"Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dengan proses mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian bertambah selama periode waktu yang panjang. Dan jika tingkat pembangunan itu lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan penduduk maka pendapatan riil perkapita akan bertambah. Dan hasil umum dari proses itu adalah bertambahnya produk nasional suatu perekonomian, yang menimbulkan suatu perubahan jangka panjang yang khusus. Yang paling penting dari perubahan-perubahan itu dapat digolongkan dalam perubahan-perubahan faktor yang fundamental dan perubahan struktural akan produk."

Dalam usaha meningkatkan pembangunan daerah, diperlukan prakarsa dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pula diperlukan suatu keuangan daerah yang makin mantap dan kokoh serta mandiri. Dalam rangka menunjang hal ini maka perlu ditingkatkan :

Pendapatan-pendapatan daerah, baik pungutan yang intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber pendapatan, maupun dengan penggalian sumber keuangan baru.

Peningkatan kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah daerah. (Suryantoro, S. 1974)

Keselarasan hubungan antara pemerintah daerah dan pusat ditinjau dari segi otonomi daerah sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan mengingat pembangunan dilaksanakan keseluruhan pelosok tanah air. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, dimana telah dilaksanakan bersama-sama secara dekon-sentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada yang dibawahnya secara vertikal.

3.2 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan :

1. Pendekatan kapitalisasi, yaitu hubungan antara pusat dan daerah dalam segi keuangan atas dasar usaha komersial. Pusat melakukan investasi di daerah, dengan harapan pemerintah daerah yang mengelolanya untuk usaha yang bersifat komersial. Keuntungan yang didapat diberikan kepada pusat sebagai deviden atau untuk keperluan memperluas usahanya. Sebagian laba menjadi milik Pemda

2. Pendekatan Sumber pendapatan (Income Sources Approach)

Pendekatan ini berdasarkan pada pemberian sumber-sumber pendapatan oleh pusat kepada daerah. Pemberian ini dapat berupa wewenang untuk menikmati sebagian dari pungutan yang dilakukan oleh atau atas nama pusat.

3. Pendekatan belanja (Expenditure Approach)

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk suatu proyek atau bidang kegiatan tertentu bagi penda.

4. Pendekatan Komprehensif (Comprehensive Approach)

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya oleh daerah itu sendiri merupakan pendapatan asli daerah. Pendekatan ini sering disebut pendekatan devisa. Karena jika daerah mengalami devisa maka pusat perlu memberikan bantuan.

Melalui 4 pendekatan diatas diperoleh penjelasan bahwa untuk menutup kebutuhan pembangunan di daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah bisa dilakukan. Semua menekankan lebih dahulu akan tanggung jawab penda dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Bila tidak cukup barulah pusat ikut membantu mengatasinya. Dalam prak-

teknanya pembiayaan pembangunan dengan kekuatan sendiri tidaklah berarti yang membiayai hanya penda saja. Pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi monopoli penda, tetapi juga menjadi tanggung jawab daerah yang bersangkutan. Artinya penda bersama-sama rakyat bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan pembangunan di daerahnya. M wujud dari tanggung jawab rakyat terhadap pembangunan di daerahnya antara lain adalah dalam bentuk dana swadaya masyarakat iimbangan, artinya suatu program/proyek bisa saja dibiayai bersama-sama antara penda dan pemerintah pusat, bila target dan tujuan pembangunan belum tercapai hanya dengan dana dari penda dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pendekatan-pendekatan yang ada, walaupun penda harus tetap mengusahakan agar pendapatan daerah terus meningkat.

3.3 Sumber-Sumber Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dapat digolongkan : (Hasri Haris, 1986)

1. Pajak

Merupakan pembayaran kepada negara oleh rakyat yang dapat dipaksakan dengan atau tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk. Dasar pengenaan pajak adalah ada atau tidaknya obyek pajak, tanpa melihat apakah ob-

yek pajak tersebut ada di daerah miskin atau tidak miskin.

2. Retribusi

Merupakan pembayaran dari rakyat kepada negara, dimana dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa secara langsung diterima dengan adanya pembayaran tersebut.

3. Keuntungan perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli maupun yang bersifat non monopoli.
4. Barang-barang milik pemerintah (saham-saham yang dipengang negara, dan sebagainya).
5. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum.
6. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar.
7. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah lainnya
8. Mencetak uang.
9. Pinjaman.

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling menentukan adalah pajak, termasuk diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun sumber-sumber penerimaan dana yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain berasal dari pajak, retribusi, perusahaan daerah serta usaha-usaha lainnya. Sumber-sumber dana ini antara lain yang harus diusahakan meningkatkannya. Untuk itu Pemda Tingkat II Banyuwangi harus dapat meningkatkan pendapatan sesuai dengan meningkatnya pembangunan yang dilaksanakan.

3.4 Pajak

Seperti disebutkan pada bab I di halaman 1 bahwa yang dimaksud dengan pajak menurut Prof. DR. P.J.A. Adriani adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (R. Santoso Brotodihardjo, S.H. 1991)

Karena pajak itu dibuat oleh pemerintah dengan kesepakatan dan disetujui oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR dan diberlakukan sebagai undang-undang, maka iuran tersebut dengan sendirinya merupakan suatu kewajiban. Apabila tidak dipatuhi atau dilaksanakan, demi keadilan dan kepentingan rakyat terbanyak (masyarakat) tentu akan dipaksakan dengan kebijaksanaan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian terkandung arti dalam sistim perpajakan di negara kita, bahwa pajak tidak akan menambah beratnya kehidupan rakyat, dan apabila ada yang nyata-nyata kurang mampu untuk memenuhi kewajibannya maka pemerintah dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan/kebijaksanaan sesuai dengan kemampuannya itu, yaitu nilai kemanusiaan dan keadilan. Namun karena pajak itu merupakan kewajiban, maka bagi setiap rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai

subyek pajak dan semua badan usaha yang melalaikan atau mengabaikan pajak akan terkena oleh paksaan (surat paksaan, Denda, Pensitaan, Pidana kurungan, dan Pidana Penjara). Besar kecilnya jumlah pajak tergantung dari besarnya nilai obyek pajak yang dimiliki/dikuasai. (G. Kartasapoetra dkk, 1989)

Ada dua hal yang timbul dari aktifitas penerimaan pajak oleh pemerintah, yaitu :

1. Siapakah yang membayar pajak, dan
2. Siapakah yang pada akhirnya menderita beban pajak.

(DR. Guritno Mangkoesobroto, M.Ec.1991)

Aspek yang pertama kurang menarik bagi para ahli keuangan negara, oleh karena telah jelas pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak (wajib pajak) tertentu, yaitu orang atau badan yang disebutkan dalam Undang-undang pajak. Misalnya pajak penghasilan suatu perseroaan, yang menjadi wajib pajak adalah perseroaan tersebut. Dalam bidang hukum suatu perseroaan dianggap sebagai suatu individu, sama seperti orang.

Aspek kedua, yaitu siapa yang sebenarnya menderita beban pajak tidaklah sesederhana aspek pertama, oleh karena pihak yang membayar pajak atau wajib pajak mungkin bukanlah pihak yang menderita beban pajak. Dengan kata lain wajib pajak tidak menderita beban pajak apabila ia dapat melimpahkan beban pajak pada orang lain. Misalnya

suatu pajak perseroan, walaupun dikenakan terhadap laba suatu perseroan, tetapi bukan perseroannya sendiri yang menderita beban pajak karena perseroan hanyalah suatu badan usaha, beban pajak dapat diderita oleh pemilik perseroan (pemilik modal), beban pajak perseroan mungkin juga diderita oleh konsumen apabila pajaknya tersebut menyebabkan harga-harga hasil produksi naik sebesar pajak. Pajak perseroan dapat pula menjadi beban pemilik faktor-faktor produksi apabila pajak tersebut menyebabkan penerimaan bersih (net earnings) para pemilik faktor produksi menurun. Teori yang menganalisis pihak yang menderita beban pajak disebut teori beban pajak (tax incidence theory).

Sebuah Undang-undang pajak baru bisa di undangkan/diberlakukan jika telah memenuhi syarat-syarat : yuridis, ekonomis, dan finansial.

A. Syarat Yuridis

Setiap Undang-undang pajak harus menunjukkan adanya keadilan dalam bidang perpajakan, artinya pajak yang akan dipungut dari rakyat/penduduk harus wajar dan sepadan dengan kemampuan jangkauan rakyat untuk membayarnya. Pajak harus terpungut dari seluruh wajib pajak dengan seadil-adilnya. Atau dengan kata lain : Pajak harus merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melunasinya, dimana pajak telah diatur dengan seadil-adilnya ka-

rena disepadankan dengan kemampuan rakyat dan penghasilan rakyat sebagai wajib pajak. Adanya prosentase yang seragam bagi pemungutannya, tatacara pemungutan dan penagihan serta pengajuan keberatan yang seragam, serta pula pemberian sanksi-sanksi yang seragam bagi setiap wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya, kesemuanya itu termasuk syarat-syarat yuridis.

B. Syarat Ekonomis

Bahwa Undang-undang pajak yang akan diperlakukan/diundangkan haruslah memenuhi syarat ekonomis, artinya :

- Besarnya jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak berdasarkan Undang-undang pajak itu harus dapat dibayar/dilunasi dari penghasilan wajib pajak tanpa mengurangi kekayaan atau apa yang telah dimilikinya.
- Ketentuan pajak berdasarkan Undang-Undang pajak itu jangan sampai menjadikan lemahnya atau menghalang-halangi perkembangan ekonomi masyarakat, terutama perdagangan dan perindustrian harus tercegah kematiannya akibat dikenakan ketentuan-ketentuan pajak tersebut.
- Ketenangan hidup masyarakat dalam mencukupi kebutuhan bahan pokoknya tidak boleh terkurangi akibat diberlakukannya Undang-undang pajak, misalnya ketentuan pajak atas sandang pangan yang memberatkan pada pemasoknya yang otomatis akan memberatkan pula masyarakat konsumennya.

(hal ini disebut kemiskinan individu). Kemiskinan yang diderita suatu golongan masyarakat karena struktur sosial, masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatn yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo sumardjan, 1980).

Pemerintah telah bertekad untuk benar-benar menanggulangi kemiskinan. Usaha ini dimulai dengan pendataan desa miskin di seluruh Indonesia yang kemudian penanganannya di tuangkan dalam Inpres Desa Miskin (IDM), kemudian diperbaharui dalam Inpres Desa Terpadu (IDT).

Dalam Podes SP (Potensi Desa Sensus Penduduk) 1990, BPS menggunakan 27 variabel di desa dan 25 Variabel di kota untuk mengukur daerah miskin.

Menurut Mubyarto (1993) dari keseluruhan variabel indikator kemiskinan ini, setiap desa miskin dapat ditelusuri sebab-sebab utamanya mengapa menjadi miskin. Ada desa yang miskin karena desa yang bersangkutan sangat terpencil, jauh dari pusat kemajuan, sehingga berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemasaran hasil produksi tidak tersedia. Ada desa-desa yang menjadi miskin semata-mata karena pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sehingga tanah-tanah pertanian dan sumber daya alam setempat sama sekali tidak mencukupi untuk menjamin penduduk dapat hidup dengan sehat. Karena di desa-desa tersebut terdapat pusat-pusat pemukiman kumuh karena migrasi

dah menjadi 3, yaitu miskin, miskin sekali, dan sangat miskin

Beberapa ahli ekonomi mendefinisikan orang miskin adalah :

1. Tidak memiliki tanah pertanian.
2. Tidak berpendidikan/berpendidikan rendah/tidak memiliki ketrampilan.
3. Tidak memiliki kemampuan managerial.
4. Tidak memiliki modal.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, pada pokoknya kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat secara ekonomis berada pada standard hidup yang rendah. Dalam pengertian yang kompleks standard hidup diartikan sebagai faktor-faktor kehidupan yang senantiasa dibutuhkan oleh setiap orang. Misalnya pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan serta macam pekerjaan yang dibawa kehidupan normal. Standard hidup yang rendah umumnya berasal dari rendahnya sumber daya alam, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya penguasaan modal, keterbelakangan teknologi dan dilain pihak disebabkan oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan yang antara lain disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penyebaran penduduk yang kurang merata, maupun sistim kelembagaan serta pranata sosial yang tidak menjamin adanya pemerataan dan atau keadilan sosial bagi masyarakat.

Dengan demikian sebagai pelaku ekonomi, orang miskin tersebut tidak dapat berbuat banyak. Oleh karenanya sulit bagi mereka untuk dapat keluar dari siklus kemiskinan, karena terjerat oleh lingkaran setan (Vicious Circle).

BAB IV

PEMBAHASAN REALISASI PENERIMAAN PBB DI DAERAH MISKIN DAN DAERAH TIDAK MISKIN DI DAERAH BANYUWANGI

4.1 Desa-Desa Miskin di Kabupaten Banyuwangi

8Seperti disebutkan pada bab II di halaman 23 bahwa prosentase kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi tergolong rendah. Prosentase sebesar 5,143% tersebut di seluruh Jawa Timur merupakan prosentase terendah setelah Surabaya yang prosentasenya sebesar 2,454%. Tetapi prosentase kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur. (Lampiran 18)

Di Propinsi Jawa Timur terdapat 8.381 desa, 1969 desa termasuk desa miskin, 9 desa diantaranya terdapat di Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 0,46%. (Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Timur 1994)

Adapun 9 desa yang termasuk miskin tersebut adalah desa Bagorejo di kecamatan Srono, desa Cantuk, Alasmalang, Padang dan Benelan Kidul di kecamatan Singojuruh. Desa Bungkun, Jelun, Kenjo dan Banjar di kecamatan Glagah. Dari 9 desa tersebut, ternyata sebagian besar (8 desa) terletak di dataran tinggi, yaitu desa-desa di kecamatan Singojuruh dan kecamatan Glagah. Kecamatan Singojuruh terletak di sekitar lereng gunung Raung, sedangkan kecamatan

Glagah terletak di sekitar kaki gunung Ijen (Kantor Statistik Banyuwangi 1993).

Seperti disebutkan dalam bab III halaman 35 bahwa salah satu kriteria desa miskin adalah desa terpencil sehingga kekurangan sarana dan prasarana. Mungkin karena desa-desa miskin di Banyuwangi terdapat di daerah pegunungan yang pada umumnya di daerah seperti ini sarana-sarana pendidikan, informasi, transportasi serta sarana-sarana umum lainnya sangat terbatas jumlahnya, sehingga menyebabkan penduduknya menjadi terbelakang yang kemudian mengakibatkan timbulnya kemiskinan.

4.2 Perbandingan Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Miskin dan Daerah Tidak Miskin

Untuk mengetahui prosentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah miskin dan daerah tidak miskin di Kabupaten Banyuwangi, diambil desa-desa di Kecamatan Srono, Singojuruh, dan Glagah sebagai sampel penelitian. Semuanya ada 36 desa, terdiri dari 9 desa miskin dan 27 desa tidak miskin.

Berdasarkan data-data yang ada pada lampiran 1, maka dapat disusun tabel sebagai berikut ini.

Tabel 4.1 REALISASI PENERIMAAN PBB DI DAERAH MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI ANTARA TAHUN 1989 - 1993

| Tahun | JUMLAH KETETAPAN | JUMLAH PENYETORAN | % |
|-------|------------------|-------------------|---------|
| 1989 | Rp. 779.003.631 | Rp. 778.856.039 | 99,99% |
| 1990 | Rp. 792.017.460 | Rp. 790.920.675 | 99,88% |
| 1991 | Rp. 733.493.223 | Rp. 814.168.476 | 110,99% |
| 1992 | Rp. 837.168.840 | Rp. 815.924.943 | 97,46% |
| 1993 | Rp. 836.341.749 | Rp. 821.087.488 | 98,20% |

Tabel 4.2 REALISASI PENERIMAAN PBB DI DAERAH TIDAK MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1989 - 1993

| Tahun | JUMLAH KETETAPAN | JUMLAH PENYETORAN | % |
|-------|-------------------|-------------------|---------|
| 1989 | Rp. 8.980.314.993 | Rp. 8.835.351.345 | 98,40% |
| 1990 | Rp. 8.893.576.082 | Rp. 9.083.265.777 | 102,13% |
| 1991 | Rp. 9.440.731.305 | Rp. 9.171.823.871 | 97,15% |
| 1992 | Rp. 9.085.742.109 | Rp. 9.235.555.173 | 101,65% |
| 1993 | Rp. 9.300.822.759 | Rp. 9.251.788.558 | 99,01% |

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan realisasi penerimaan PBB antara daerah miskin dan daerah tidak miskin digunakan analisis uji-t.

Dari lampiran 2, maka diperoleh hasil perhitungan, dimana $t_{hitung} = -0,18$, sedangkan $t_{tabelnya}$ sebesar 3,132. Hal ini berarti tidak ada perbedaan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara daerah miskin dan daerah tidak miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari data-data yang ada di lampiran 1-17 serta berdasarkan hasil analisis di bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1989 hingga tahun 1993 secara nominal selalu mengalami kenaikan baik di daerah miskin maupun di daerah tidak miskin.
2. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah miskin antara tahun 1989-1993 ternyata hanya bisa memenuhi target pada tahun 1991, sedangkan untuk tahun 1989, 1990, 1992, dan 1993 tidak bisa memenuhi target. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah tidak miskin antara tahun 1989-1993 bisa memenuhi target pada tahun 1990 dan 1992, sedangkan untuk tahun 1989, 1991 dan 1993 tidak bisa memenuhi target.

5.2 Saran

Saran yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara daerah miskin dengan daerah tidak miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Untuk lebih meningkatkan jumlah penerimaan PBB yang antara tahun 1988-1993 umumnya selalu meningkat, maka upaya untuk melakukan penarikan PBB harus lebih ditingkatkan. Disamping itu juga perlu lebih ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak melalui penyuluhan dan penerangan baik di tingkat desa maupun kecamatan.
2. Dengan melihat kenyataan bahwa ternyata baik daerah miskin maupun daerah tidak miskin mempunyai kemampuan yang sama dalam memenuhi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan di daerah masing-masing, maka diharapkan para aparat pajak dapat lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga prinsip-prinsip keadilan dalam perpajakan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu diharapkan para aparat dan instansi perpajakan dapat meningkatkan koordinasi, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Heidar, Drs., M.Phil, Upaya Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pendekatan Institusional, dalam *Ecpose* No. 12 Tahun IV, 1994
- Bintoro Tjokro Amijoyo, Pemikiran Tentang Teori Pembangunan Nasional, PT. Karya Nusantar, Bandung, 1980.
- Bambang Waluyo, S.H., Pemeriksaan dan Peradilan Dibidang Perpajakan, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- David H. Peny, Kemiskinan: Peranan Sistim Pasar, UI-Press, Jakarta, 1990.
- Dumairy, Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi, BPFE, Jogjakarta, 1983.
- G. M. Meier dan Baldwin R.E., Ekonomi Pembangunan, Bharata, Jakarta, 1972.
- G. Kartasapoetra, E. Komarudin, Rience G. Kartasapoetra, Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Guritno Mangkoesoebroto, DR, Mec. Ekonomi Publik, BPFE, Jogjakarta, 1991.
- Hadi Prayitno, Pengantar Ekonomika Pembangunan, BPFE, Jogjakarta, 1986.
- Irawan, W. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, BPFE Jogjakarta, 1992.
- Jarwanto, Statistik Induktif, BPFE, Jogjakarta, 1988.
- Josep Riwo Kuno, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Masri Maris, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UIP, Jakarta, 1986.
- Murdiyanto Poerbangkoro, DR, SU, Pengentasan Kemiskinan Dengan Pendekatan Sumber Daya Manusia, Dalam *Ecpose* No. 12 Tahun IV, 1994.

- Mubyarto, Prof, Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan,
Paper Konggres ISEI XII, Surabaya, 1993.
- R. Santoso Brotodihardjo, S.H., Pengantar Ilmu Hukum
Pajak, PT Eresco, Bandung, 1991.
- Rochmat Soemitro, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, PT.
Eresco, Bandung, 1991.
- Sayogyo, Golongan Miskin dan Partisipasi Dalam Pembangunan
Desa, Prisma No. 3 Tahun IV, 1993.
- Selo Sumarjan Dkk, Kemiskinan Struktural Suatu Bunga
Rampai, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, 1980.
- Thee Kian Wie, DR., Pemerataan-Kemiskinan-Ketimpangan,
Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
- UUD '45, P4, GBHN (Tap MPR No II/MPR/1993), UIP, Jakarta,
1993.

Lampiran 1

PROSENTASE REALISASI PENERIMAAN PBB DI DAERAH MISKIN
DAN DAERAH TIDAK MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI
ANTARA TAHUN 1989 - 1993

Pada tahun 1989 terdapat data-data sebagai berikut:

Realisasi penerimaan PBB daerah miskin = Rp. 778.956.039,-

Target penerimaannya = Rp. 779.003.631,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 778.956.039,-}}{\text{Rp. 779.003.631,-}} \times 100 \% \\ &= 99,99 \% \end{aligned}$$

Realisasi penerimaan PBB daerah tidak miskin =

Rp. 8.835.351.345,-

Target penerimaannya = Rp. 8.980.314.993,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 8.835.351.345,-}}{\text{Rp. 8.980.314.993,-}} \times 100 \% \\ &= 98,40 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 1990 data-data yang ada sebagai berikut:

Realisasi penerimaan PBB daerah miskin = Rp. 790.920.675,-

Target penerimaannya = Rp. 792.017.460,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 790.920.675,-}}{\text{Rp. 792.017.460,-}} \times 100 \% \\ &= 99,86 \% \end{aligned}$$

Realisasi penerimaan PBB daerah tidak miskin =

Rp. 9.083.285.777,-

Target penerimaannya = Rp. 8.893.578.062,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 9.083.265.777,-}}{\text{Rp. 8.893.576.062,-}} \times 100 \% \\ &= 102,13 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 1991 terdapat data-data sebagai berikut:

Realisasi penerimaan PBB daerah miskin = Rp. 814.168.476,-

Target penerimaannya = Rp. 733.493.223,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 814.168.476,-}}{\text{Rp. 733.493.223,-}} \times 100 \% \\ &= 110,99 \% \end{aligned}$$

Realisasi penerimaan PBB daerah tidak miskin =

Rp. 9.171.623.871,-

Target penerimaannya = Rp. 9.440.731.305,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 9.171.623.871,-}}{\text{Rp. 9.440.731.305,-}} \times 100 \% \\ &= 97,15 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 1992 terdapat data-data sebagai berikut:

Realisasi penerimaan PBB daerah miskin = Rp. 815.924.943,-

Target penerimaannya = Rp. 837.168.840,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 815.924.943,-}}{\text{Rp. 837.168.840,-}} \times 100 \% \\ &= 97,46 \% \end{aligned}$$

Realisasi penerimaan PBB daerah tidak miskin =

Rp. 9.235.555.173,-

Target penerimaannya = Rp. 9.085.742.109,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 9.235.555.173,-}}{\text{Rp. 9.085.742.109,-}} \times 100 \% \\ &= 101,65 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 1993 terdapat data-data sebagai berikut :

Realisasi penerimaan PBB daerah miskin = Rp. 821.087.488,-

Target penerimaannya = Rp. 836.341.749,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 821.087.488,-}}{\text{Rp. 836.341.749,-}} \times 100 \% \\ &= 98,20 \% \end{aligned}$$

Realisasi penerimaan PBB daerah tidak miskin =

Rp. 9.251.786.558,-

Target penerimaannya = Rp. 9.300.822.759,-

$$\begin{aligned} \text{Maka prosentase realisasinya} &= \frac{\text{Rp. 9.251.786.558,-}}{\text{Rp. 9.300.822.759,-}} \times 100 \% \\ &= 93,01 \% \end{aligned}$$

Lampiran 2

ANALISIS UJI BEDA UNTUK MENGETAHUI APAKAH TERDAPAT PERBEDAAN PROSENTASE REALISASI PENERIMAAN PBB ANTARA DAERAH MISKIN DAN DAERAH TIDAK MISKIN.

Untuk itu dipakai analisis uji-t, dengan rumus :

$$t = \frac{\bar{D}}{S_d/\sqrt{n}}$$

dimana $\bar{D} = X - Y$

S_d = Standard Deviasi

n = Banyaknya Pasangan

(Jarwanto, 1988)

Dengan tingkat keyakinan 95%.

Berdasarkan data di lampiran 1 dapat disusun sebuah tabel berikut :

| Tahun | X (%) | Y (%) | D | $(D - \bar{D})^2$ |
|-------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1989 | 98,40 | 99,99 | -1,59 | 1,69 |
| 1990 | 102,13 | 99,80 | 2,33 | 27,25 |
| 1991 | 97,15 | 110,99 | -13,84 | 119,902 |
| 1992 | 101,65 | 97,46 | 4,19 | 50,126 |
| 1993 | 91,52 | 97,10 | -5,58 | 7,236 |
| | | | -14,49 | 206,204 |

X adalah prosentase realisasi penerimaan PBB di daerah tidak miskin.

Y adalah prosentase realisasi penerimaan PBB di daerah miskin.

$D = X - y$

$$\begin{aligned}\bar{D} &= D/n \\ &= -14,49/5 \\ &= -2,89\end{aligned}$$

S_d = Standard Deviasi

$$\begin{aligned}&= f \frac{1}{n-1} (D - \bar{D})^2 \\ &= f \frac{1}{n-1} \times 206,204 = 7,18\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t &= \frac{\bar{D}}{S_d/fn} \\ &= \frac{-2,89}{7,18/15} \\ &= \frac{-2,89}{16,05} \\ &= -0,18\end{aligned}$$

Jadi $t_{hitung} = -0,18$ sedangkan t_{tabel} nya = 2,132 .

Lampiran 3

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1989

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Srono | | | |
| 1 | Desa Bagorejo | Rp. 24.556.732 | Rp. 24.560.700 | 100,02% |
| 2 | Desa Kebaman | Rp. 21.447.755 | Rp. 21.500.845 | 100,25% |
| 3 | Desa Parijatah Kulon | Rp. 15.120.223 | Rp. 15.120.450 | 100,00% |
| 4 | Desa Parijatah Wetan | Rp. 16.567.445 | Rp. 16.600.327 | 100,20% |
| 5 | Desa Sukonatar | Rp. 33.541.735 | Rp. 33.584.400 | 100,07% |
| 6 | Desa Summersari | Rp. 41.554.635 | Rp. 41.578.320 | 100,06% |
| 7 | Desa Wonosobo | Rp. 19.046.735 | Rp. 19.096.220 | 100,26% |
| | J u m l a h | Rp. 171.835.260 | Rp. 172.021.262 | 100,11% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1989

Lampiran 4

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1989**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Glagah | | | |
| 1 | Desa Bakungan | Rp. 3.550.795 | Rp. 3.550.898 | 100,00% |
| 2 | Desa Banjar | Rp. 7.298.245 | Rp. 7.299.340 | 100,02% |
| 3 | Kelurahan Banjarsari | Rp. 5.479.246 | Rp. 5.480.150 | 100,02% |
| 4 | Desa Glagah | Rp. 5.155.327 | Rp. 5.155.420 | 100,00% |
| 5 | Desa Gumuk | Rp. 8.555.428 | Rp. 8.556.285 | 100,01% |
| 6 | Desa Jelun | Rp. 8.488.295 | Rp. 8.500.165 | 146,42% |
| 7 | Desa Kampunganyar | Rp. 7.525.793 | Rp. 7.526.295 | 100,01% |
| 8 | Desa Kemitren | Rp. 3.258.125 | Rp. 3.259.110 | 100,03% |
| 9 | Desa Kenjo | Rp. 8.755.241 | Rp. 8.755.242 | 100,00% |
| 10 | Desa Kluncoing | Rp. 8.460.145 | Rp. 8.460.240 | 100,00% |
| 11 | Desa Licin | Rp. 7.120.140 | Rp. 7.120.250 | 100,00% |
| 12 | Desa Olehsari | Rp. 5.120.348 | Rp. 5.120.556 | 100,00% |
| 13 | Desa Pakel | Rp. 3.340.145 | Rp. 3.246.245 | 97,19% |
| 14 | Desa Paspan | Rp. 7.644.246 | Rp. 7.599.978 | 99,42% |
| 15 | Desa Rejosari | Rp. 3.142.300 | Rp. 3.143.040 | 100,02% |
| 16 | Desa Segobang | Rp. 11.100.250 | Rp. 11.098.950 | 99,99% |
| 17 | Desa Tamansari | Rp. 7.560.144 | Rp. 7.558.798 | 99,96% |
| 18 | Desa Tansuruh | Rp. 11.115.956 | Rp. 11.116.846 | 100,01% |
| | Jumlah | Rp. 120.670.167 | Rp. 123.547.806 | 102,38% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi. 1989

Lampiran 5

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN SINGOJURUH
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1989**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Singojuruh | | | |
| 1 | Desa Alasmalang | Rp. 8.300.296 | Rp. 8.250.998 | 99,41% |
| 2 | Desa Benelan Kidul | Rp. 10.620.394 | Rp. 10.620.395 | 100,00% |
| 3 | Desa Cantuk | Rp. 9.425.336 | Rp. 9.450.200 | 100,26% |
| 4 | Desa Gambor | Rp. 7.550.165 | Rp. 7.560.250 | 100,13% |
| 5 | Desa Gendoh | Rp. 14.120.264 | Rp. 14.125.200 | 100,03% |
| 6 | Desa Gunirih | Rp. 16.250.423 | Rp. 16.260.225 | 100,06% |
| 7 | Desa Kemiri | Rp. 29.165.346 | Rp. 29.150.450 | 99,95% |
| 8 | Desa Lenahbang Kulon | Rp. 4.950.250 | Rp. 4.990.335 | 100,81% |
| 9 | Desa Padang | Rp. 7.560.625 | Rp. 7.562.735 | 100,03% |
| 10 | Desa Singolaten | Rp. 8.275.415 | Rp. 8.275.415 | 100,00% |
| 11 | Desa Singojuruh | Rp. 10.436.275 | Rp. 10.440.300 | 100,04% |
| | J u m l a h | Rp. 126.654.789 | Rp. 126.686.503 | 100,03% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1989

Lampiran 6

DAFTAR REALISASI PENKRIMAAN PBB
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1990

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Srono | | | |
| 1 | Desa Bagorejo | Rp. 25.356.900 | Rp. 25.455.854 | 100,39% |
| 2 | Desa Kebaman | Rp. 22.643.733 | Rp. 22.644.800 | 100,00% |
| 3 | Desa Parijatah Kulon | Rp. 15.344.443 | Rp. 15.344.500 | 100,00% |
| 4 | Desa Parijatah Wetan | Rp. 16.780.344 | Rp. 16.788.400 | 100,05% |
| 5 | Desa Sukonatar | Rp. 33.790.583 | Rp. 33.880.790 | 100,27% |
| 6 | Desa Summersari | Rp. 41.738.442 | Rp. 41.738.500 | 100,00% |
| 7 | Desa Wonosobo | Rp. 19.102.550 | Rp. 19.105.600 | 100,02% |
| | J u m l a h | Rp. 174.756.995 | Rp. 174.956.444 | 100,12% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1990

Lampiran 7

**DAFTAR REALISASI PENKRIMAAN PBB
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1990**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Glagah | | | |
| 1 | Desa Balungan | Rp. 3.554.321 | Rp. 3.556.423 | 100,06% |
| 2 | Desa Banjar | Rp. 7.288.425 | Rp. 7.198.224 | 98,78% |
| 3 | Kelurahan Banjarsari | Rp. 5.699.224 | Rp. 5.721.326 | 100,39% |
| 4 | Desa Glagah | Rp. 5.246.332 | Rp. 5.255.740 | 100,18% |
| 5 | Desa Gumuk | Rp. 8.556.798 | Rp. 8.560.750 | 100,05% |
| 6 | Desa Jelun | Rp. 8.578.445 | Rp. 8.580.240 | 100,03% |
| 7 | Desa Kampunganyar | Rp. 7.554.288 | Rp. 7.555.405 | 100,01% |
| 8 | Desa Kemitren | Rp. 3.122.475 | Rp. 3.124.372 | 100,06% |
| 9 | Desa Kenjo | Rp. 8.799.755 | Rp. 8.800.888 | 100,01% |
| 10 | Desa Kluncing | Rp. 8.554.253 | Rp. 8.560.795 | 100,06% |
| 11 | Desa Licin | Rp. 7.560.255 | Rp. 7.570.405 | 100,13% |
| 12 | Desa Olehsari | Rp. 5.045.246 | Rp. 5.047.300 | 100,04% |
| 13 | Desa Pakel | Rp. 3.244.792 | Rp. 3.246.760 | 100,06% |
| 14 | Desa Paspas | Rp. 7.640.885 | Rp. 7.450.798 | 97,52% |
| 15 | Desa Rejosari | Rp. 3.044.275 | Rp. 3.050.250 | 100,20% |
| 16 | Desa Segobang | Rp. 11.150.945 | Rp. 11.145.998 | 99,96% |
| 17 | Desa Tamansari | Rp. 7.880.296 | Rp. 7.799.979 | 98,98% |
| 18 | Desa Tmansuruh | Rp. 11.126.275 | Rp. 11.126.928 | 100,01% |
| | Jumlah | Rp. 114.647.043 | Rp. 121.353.579 | 105,85% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1990

Lampiran 8

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN SINGOJURU
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1990**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Singojuruh | | | |
| 1 | Desa Alasmalang | Rp. 8.296.448 | Rp. 8.300.555 | 100,05% |
| 2 | Desa Benelan Kidul | Rp. 10.550.295 | Rp. 10.590.300 | 100,38% |
| 3 | Desa Cantuk | Rp. 9.728.586 | Rp. 9.496.248 | 97,63% |
| 4 | Desa Gombor | Rp. 7.628.229 | Rp. 7.630.300 | 100,03% |
| 5 | Desa Gendoh | Rp. 14.150.246 | Rp. 14.151.150 | 100,01% |
| 6 | Desa Gumirih | Rp. 16.525.750 | Rp. 16.550.650 | 100,15% |
| 7 | Desa Kemiri | Rp. 29.435.360 | Rp. 29.250.225 | 99,37% |
| 8 | Desa Lemahbang Kulon | Rp. 5.150.280 | Rp. 5.155.150 | 100,08% |
| 9 | Desa Padang | Rp. 7.850.765 | Rp. 7.900.345 | 100,63% |
| 10 | Desa Singolaten | Rp. 8.350.846 | Rp. 8.400.125 | 100,59% |
| 11 | Desa Singojuruh | Rp. 10.525.223 | Rp. 10.560.345 | 100,33% |
| | J u m l a h | Rp. 128.190.008 | Rp. 127.985.393 | 99,84% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1990

Lampiran 9

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1991

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Srono | | | |
| 1 | Desa Bagorejo | Rp. 25.214.846 | Rp. 25.214.900 | 100,00% |
| 2 | Desa Kebanan | Rp. 22.783.353 | Rp. 23.163.936 | 101,67% |
| 3 | Desa Parijatah Kulon | Rp. 15.445.977 | Rp. 15.446.267 | 100,00% |
| 4 | Desa Parijatah Wetan | Rp. 17.608.016 | Rp. 17.608.716 | 100,00% |
| 5 | Desa Sukonatar | Rp. 34.821.726 | Rp. 34.821.726 | 100,00% |
| 6 | Desa Sumbersari | Rp. 42.941.943 | Rp. 42.941.943 | 100,00% |
| 7 | Desa Wonosobo | Rp. 19.011.767 | Rp. 19.011.767 | 100,00% |
| | Jumlah | Rp. 177.827.628 | Rp. 178.209.255 | 100,21% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1991

Lampiran 10

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1991.**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|-------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Glagah | | | |
| 1 | Desa Bakungan | Rp. 3.918.856 | Rp. 3.918.856 | 100,00% |
| 2 | Desa Banjar | Rp. 7.371.346 | Rp. 7.267.449 | 98,59% |
| 3 | Kelurahan Banjarsari | Rp. 5.798.619 | Rp. 5.886.104 | 101,16% |
| 4 | Desa Glagah | Rp. 5.517.425 | Rp. 5.517.486 | 100,00% |
| 5 | Desa Gumuk | Rp. 8.081.931 | Rp. 8.091.708 | 100,12% |
| 6 | Desa Jelun | Rp. 6.967.566 | Rp. 6.967.792 | 100,00% |
| 7 | Desa Kampunganyar | Rp. 7.676.534 | Rp. 7.676.534 | 100,00% |
| 8 | Desa Kemitren | Rp. 3.101.364 | Rp. 3.104.516 | 100,10% |
| 9 | Desa Kenjo | Rp. 9.088.452 | Rp. 9.088.252 | 100,00% |
| 10 | Desa Kluncing | Rp. 8.425.018 | Rp. 8.425.018 | 100,00% |
| 11 | Desa Licin | Rp. 7.702.424 | Rp. 7.703.282 | 100,01% |
| 12 | Desa Olehsari | Rp. 5.103.473 | Rp. 5.103.637 | 100,00% |
| 13 | Desa Pakel | Rp. 3.448.114 | Rp. 3.348.018 | 97,10% |
| 14 | Desa Paspas | Rp. 7.725.986 | Rp. 7.725.995 | 100,00% |
| 15 | Desa Rejosari | Rp. 3.023.617 | Rp. 3.083.617 | 101,98% |
| 16 | Desa Segobang | Rp. 11.215.302 | Rp. 10.725.943 | 95,64% |
| 17 | Desa Tamansari | Rp. 7.415.546 | Rp. 6.915.546 | 93,26% |
| 18 | Desa Tamansuruh | Rp. 11.131.335 | Rp. 11.136.986 | 100,05% |
| | J u m l a h | Rp. 122.712.908 | Rp. 121.666.717 | 99,15% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1991

Lampiran 11

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN SINGOJURU
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1991**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Singojuruh | | | |
| 1 | Desa Alasmalang | Rp. 8.384.464 | Rp. 8.468.821 | 101,01% |
| 2 | Desa Benelan Kidul | Rp. 11.137.109 | Rp. 11.464.166 | 102,94% |
| 3 | Desa Cantuk | Rp. 9.909.850 | Rp. 9.909.850 | 100,00% |
| 4 | Desa Gumbor | Rp. 7.857.181 | Rp. 8.145.781 | 103,67% |
| 5 | Desa Gendoh | Rp. 14.254.725 | Rp. 14.561.796 | 102,15% |
| 6 | Desa Gumirih | Rp. 16.943.673 | Rp. 17.556.664 | 103,62% |
| 7 | Desa Kemiri | Rp. 30.019.385 | Rp. 27.030.875 | 90,04% |
| 8 | Desa Lemahbang Kulon | Rp. 5.192.906 | Rp. 5.192.906 | 100,00% |
| 9 | Desa Padang | Rp. 7.891.222 | Rp. 8.163.058 | 103,44% |
| 10 | Desa Singolatren | Rp. 8.400.683 | Rp. 8.816.076 | 104,94% |
| 11 | Desa Singojuruh | Rp. 10.673.534 | Rp. 11.034.002 | 103,38% |
| | J u m l a h | Rp. 130.664.932 | Rp. 130.344.015 | 99,75% |

Sumber : Dins Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1991

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN SINGOJURUH
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1992**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Singojuruh | | | |
| 1 | Desa Alasmalang | Rp. 8.557.397 | Rp. 7.417.994 | 86,89% |
| 2 | Desa Benelan Kidul | Rp. 10.959.341 | Rp. 10.568.926 | 96,44% |
| 3 | Desa Cantuk | Rp. 9.457.614 | Rp. 8.453.877 | 89,39% |
| 4 | Desa Gambor | Rp. 9.171.075 | Rp. 9.171.075 | 100,00% |
| 5 | Desa Gendoh | Rp. 15.467.745 | Rp. 15.467.707 | 100,00% |
| 6 | Desa Gumirih | Rp. 17.051.764 | Rp. 17.054.228 | 100,01% |
| 7 | Desa Kemiri | Rp. 24.448.825 | Rp. 24.418.991 | 99,88% |
| 8 | Desa Lemahbang Kulon | Rp. 5.100.296 | Rp. 5.314.914 | 104,21% |
| 9 | Desa Padang | Rp. 7.861.118 | Rp. 7.863.900 | 100,04% |
| 10 | Desa Singolatren | Rp. 8.390.795 | Rp. 8.400.073 | 100,11% |
| 11 | Desa Singojuruh | Rp. 10.734.900 | Rp. 10.739.928 | 100,05% |
| | J u m l a h | Rp. 127.200.870 | Rp. 124.871.613 | 98,17% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1992

Lampiran 14

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1992**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|-------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Glagah | | | |
| 1 | Desa Balungan | Rp. 7.625.098 | Rp. 7.651.490 | 100,35% |
| 2 | Desa Banjar | Rp. 7.304.013 | Rp. 6.904.112 | 94,52% |
| 3 | Kelurahan Banjarsari | Rp. - | Rp. - | - |
| 4 | Desa Glagah | Rp. 5.982.129 | Rp. 6.232.758 | 104,19% |
| 5 | Desa Gumuk | Rp. 8.156.587 | Rp. 8.096.348 | 99,26% |
| 6 | Desa Jelun | Rp. 6.918.693 | Rp. 6.918.693 | 100,00% |
| 7 | Desa Kampunganyar | Rp. 7.752.134 | Rp. 7.601.639 | 98,06% |
| 8 | Desa Kemitren | Rp. 3.036.064 | Rp. 3.036.064 | 100,00% |
| 9 | Desa Kenjo | Rp. 9.528.402 | Rp. 9.679.478 | 101,58% |
| 10 | Desa Kluncing | Rp. 7.653.114 | Rp. 7.765.992 | 101,47% |
| 11 | Desa Licin | Rp. 9.832.430 | Rp. 10.169.591 | 103,43% |
| 12 | Desa Olehsari | Rp. 5.038.027 | Rp. 5.038.027 | 100,00% |
| 13 | Desa Pakel | Rp. 3.827.023 | Rp. 3.801.730 | 99,34% |
| 14 | Desa Paspas | Rp. 7.708.735 | Rp. 7.724.197 | 100,20% |
| 15 | Desa Rejosari | Rp. 3.034.486 | Rp. 3.034.486 | 100,00% |
| 16 | Desa Segobang | Rp. 11.625.467 | Rp. 10.941.713 | 94,12% |
| 17 | Desa Tamansari | Rp. 7.486.795 | Rp. 7.308.595 | 97,62% |
| 18 | Desa Tansuruh | Rp. 11.512.798 | Rp. 11.512.798 | 100,00% |
| | Jumlah | Rp. 124.021.995 | Rp. 123.417.711 | 99,51% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1992

Lampiran 15

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1993**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Srono | | | |
| 1 | Desa Bagorejo | Rp. 23.903.588 | Rp. 23.250.753 | 97,27% |
| 2 | Desa Kebanan | Rp. 22.423.574 | Rp. 21.761.877 | 97,05% |
| 3 | Desa Parijatah Kulon | Rp. 15.297.637 | Rp. 14.430.720 | 94,33% |
| 4 | Desa Parijatah Wetan | Rp. 16.867.891 | Rp. 16.410.864 | 97,29% |
| 5 | Desa Sukonatar | Rp. 33.901.983 | Rp. 33.901.983 | 100,00% |
| 6 | Desa Sumbersari | Rp. 42.057.683 | Rp. 18.847.942 | 44,81% |
| 7 | Desa Wonosobo | Rp. 20.133.738 | Rp. 20.218.225 | 100,42% |
| | J u m l a h | Rp. 174.586.204 | Rp. 148.822.364 | 85,24% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1993

Lampiran 16

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN SINGOJURUH
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1993

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Singojuruh | | | |
| 1 | Desa Alasmalang | Rp. 8.456.469 | Rp. 7.185.303 | 84,97% |
| 2 | Desa Benelan Kidul | Rp. 11.211.129 | Rp. 10.133.509 | 90,38% |
| 3 | Desa Cantuk | Rp. 9.414.113 | Rp. 9.418.354 | 100,05% |
| 4 | Desa Gambor | Rp. 9.078.339 | Rp. 9.090.571 | 100,13% |
| 5 | Desa Gendoh | Rp. 15.363.390 | Rp. 14.044.300 | 91,41% |
| 6 | Desa Gumirih | Rp. 16.489.161 | Rp. 16.488.911 | 100,12% |
| 7 | Desa Kemiri | Rp. 24.524.930 | Rp. 23.434.335 | 95,55% |
| 8 | Desa Lemahbang Kulon | Rp. 4.926.871 | Rp. 407.432 | 8,27% |
| 9 | Desa Padang | Rp. 7.786.899 | Rp. 7.793.570 | 100,08% |
| 10 | Desa Singolatreu | Rp. 8.633.570 | Rp. 7.626.748 | 88,34% |
| 11 | Desa Singojuruh | Rp. 10.509.420 | Rp. 10.523.492 | 100,13% |
| | Jumlah | Rp. 126.374.291 | Rp. 116.146.525 | 91,91% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1993

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI
PER 31 MARET 1993**

| No | Kecamatan/Kelurahan | Jumlah Ketetapan | Jumlah Penyetoran | % |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | Kecamatan Glagah | | | |
| 1 | Desa Balungon | Rp. 7.128.103 | Rp. 7.167.326 | 100,58% |
| 2 | Desa Banjar | Rp. 7.888.858 | Rp. 7.888.858 | 100,00% |
| 3 | Kelurahan Banjarsari | Rp. - | Rp. - | - |
| 4 | Desa Glagah | Rp. 5.327.997 | Rp. 5.328.105 | 100,00% |
| 5 | Desa Gumuk | Rp. 9.119.394 | Rp. 9.119.394 | 100,00% |
| 6 | Desa Jelun | Rp. 7.642.347 | Rp. 7.647.347 | 100,07% |
| 7 | Desa Kampunganyar | Rp. 10.918.174 | Rp. 10.219.343 | 93,60% |
| 8 | Desa Kemitren | Rp. 3.218.148 | Rp. 3.218.148 | 100,00% |
| 9 | Desa Kenjo | Rp. 9.497.347 | Rp. 9.635.814 | 101,46% |
| 10 | Desa Kluncing | Rp. 11.284.251 | Rp. 11.472.282 | 101,67% |
| 11 | Desa Licin | Rp. 9.618.082 | Rp. 9.353.052 | 97,24% |
| 12 | Desa Olehsari | Rp. 5.148.392 | Rp. 5.008.746 | 97,27% |
| 13 | Desa Pakel | Rp. 4.278.519 | Rp. 4.262.334 | 99,62% |
| 14 | Desa Paspan | Rp. 8.079.916 | Rp. 8.108.929 | 100,36% |
| 15 | Desa Rejosari | Rp. 3.183.070 | Rp. 3.183.078 | 100,00% |
| 16 | Desa Segobang | Rp. 12.269.667 | Rp. 12.269.667 | 100,00% |
| 17 | Desa Tamansari | Rp. 11.376.992 | Rp. 11.778.114 | 103,53% |
| 18 | Desa Tmansuruh | Rp. 10.546.905 | Rp. 10.990.910 | 104,21% |
| | J u m l a h | Rp. 136.525.160 | Rp. 136.651.425 | 100,09% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi, 1993

Lampiran 18

DATA-DATA DESA MISKIN PER-KABUPATEN/KOTAMADYA
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

| No | KABUPATEN | JUMLAH DESA | DESA MISKIN |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Pacitan | 164 | 37 |
| 2 | Trenggalek | 157 | 40 |
| 3 | Ponorogo | 303 | 109 |
| 4 | Magetan | 235 | 18 |
| 5 | Ngawi | 215 | 52 |
| 6 | Bojonegoro | 430 | 149 |
| 7 | Tuban | 328 | 98 |
| 8 | Gresik | 357 | 42 |
| 9 | Lanogan | 475 | 66 |
| 10 | Nganjuk | 277 | 97 |
| 11 | Madiun | 233 | 45 |
| 12 | Kediri | 390 | 65 |
| 13 | Tulungagung | 271 | 55 |
| 14 | Jombang | 306 | 59 |
| 15 | Mojokerto | 322 | 50 |
| 16 | Surabaya | 163 | 4 |
| 17 | Sidoarjo | 353 | 24 |
| 18 | Pasuruan | 399 | 119 |
| 19 | Probolinggo | 359 | 95 |
| 20 | Lumajang | 199 | 47 |
| 21 | Malang | 463 | 69 |
| 22 | Blitar | 268 | 49 |
| 23 | Jember | 223 | 20 |
| 24 | Bondowoso | 192 | 50 |
| 25 | Situbondo | 136 | 38 |
| 26 | Banyuwangi | 175 | 9 |
| 27 | Bengkalan | 281 | 173 |
| 28 | Sampang | 186 | 109 |
| 29 | Pamekasan | 178 | 58 |
| 30 | Sumenep | 332 | 122 |
| | Jumlah | 8381 | 1969 |

Sumber : Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Timur
1994